



Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Multidimensi di NTB

Asep Suryahadi

The SMERU Research Institute

Latar Belakang:

Dari Millenium Development Goals (MDG) ke Sustainable Development Goals (SDG)



Latar Belakang

- Capaian Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB):
 - Propinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan juara satu *Millennium Development Goals (MDGs) Award* sejak tahun 2011 hingga 2015.
- Peralihan MDG ke SDG: SDG mencakup lebih banyak indikator dibandingkan dengan MDG.
 - Beberapa indikator SDGs yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil.
 - Beberapa indikator mengikutsertakan standar dasar hak asasi manusia (HAM) seperti kesetaraan gender, bentuk-bentuk diskriminasi, dan pelanggaran HAM. MDGs dianggap belum menyertakan aspek-aspek tersebut.
 - Terdapat indikator yang mengukur kemiskinan dari aspek selain moneter.



1
NO
POVERTY



Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan

- Persentase penduduk yang mengalami **kemiskinan multidimensi** ekstrem (Tujuan 1: Indikator 4).
- Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) menyediakan perspektif alternatif dalam melihat kemiskinan.
- IKM menggambarkan persentase rata-rata penduduk yang mengalami kekurangan dalam berbagai dimensi kesejahteraan.
- IKM mengukur kekurangan (deprivasi) setiap individu dalam beberapa dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

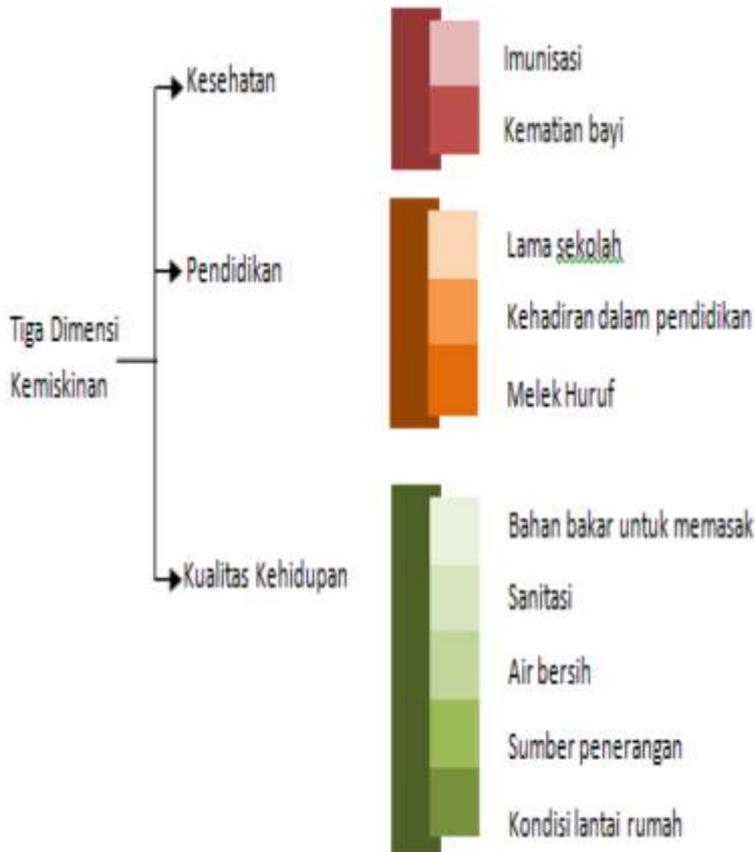


IKM dalam SDG

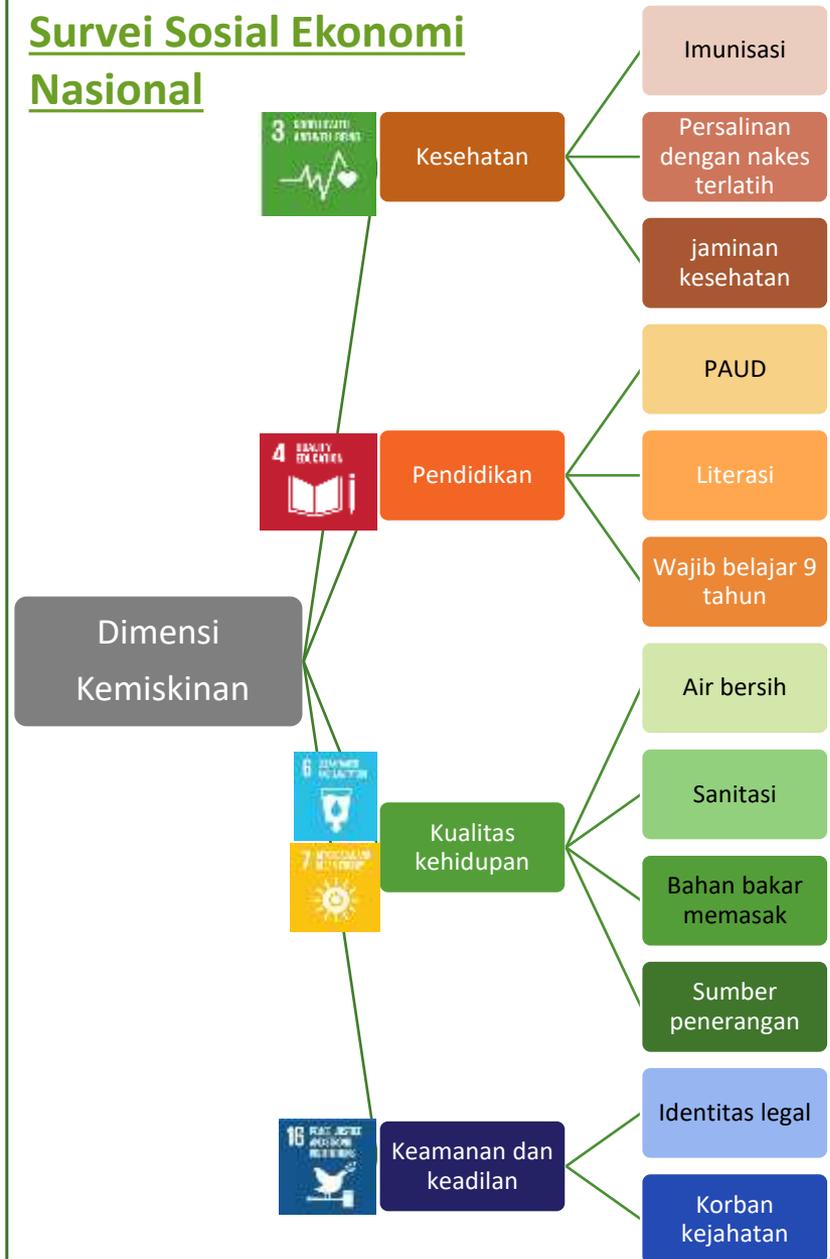
- IKM menjadi indikator yang penting dlm SDG karena:
 1. Penghitungan IKM mencakup penggunaan dari indikator SDG lainnya
 2. Dimensi atau indikator yang dipilih dapat disesuaikan dengan apa yang dianggap sebagai capaian yang penting oleh institusi/lembaga yang menggunakan IKM dalam penentuan kebijakan.
 3. Dimensi atau indikator dalam tiap dimensi dapat disesuaikan dengan data yang tersedia

Modifikasi IKM

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia



Survei Sosial Ekonomi Nasional

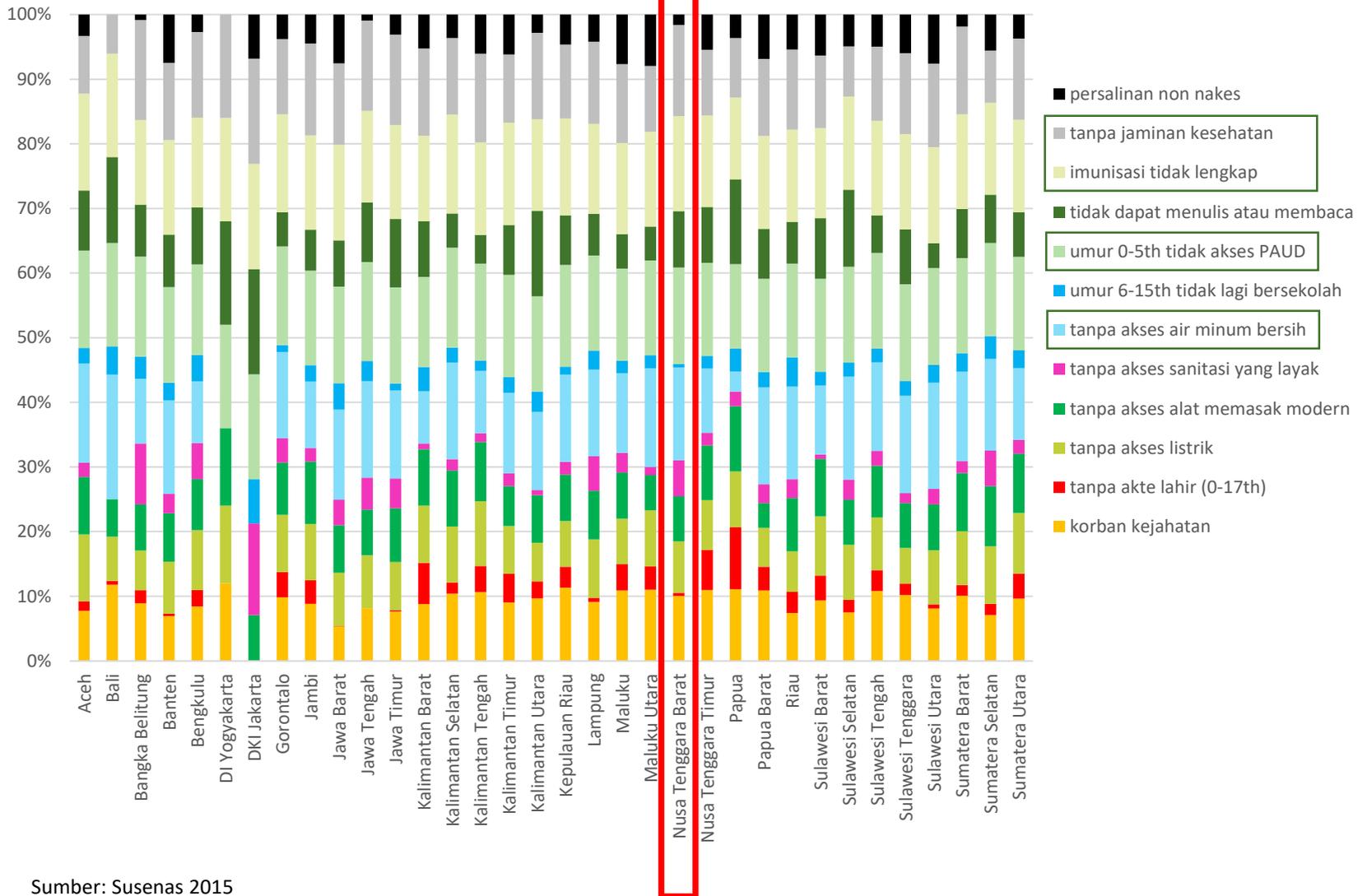


Propinsi	GKM	% individu yang terdeprivasi di 2 dimensi (IKM)	Ranking GKM	Ranking IKM
DKI Jakarta	3.93	0.07	1	2
Bali	4.74	0.22	2	3
Kalimantan Selatan	4.99	1.15	3	14
Bangka Belitung	5.40	0.44	4	6
Banten	5.90	1.81	5	20
Kalimantan Tenggara	5.94	2.54	6	24
Kalimantan Timur	6.23	0.27	7	4
Kalimantan Utara	6.24	1.03	8	13
Kepulauan Riau	6.24	0.41	9	5
Maluku Utara	6.84	4.58	10	31
Sumatera Barat	7.31	2.64	11	25
Kalimantan Barat	8.03	2.89	12	26
Riau	8.42	1.43	13	16
Sulawesi Utara	8.65	0.93	14	12
Jambi	8.86	1.44	15	17
Sulawesi Selatan	9.39	1.17	16	15
Jawa Barat	9.53	0.68	17	9
Sumatera Utara	10.53	1.82	18	21
Jawa Timur	12.34	0.81	19	11
Sulawesi Barat	12.40	4.01	20	29
Sulawesi Tenggara	12.90	3.46	21	27
Jawa Tengah	13.58	0.44	22	7
Sumatera Selatan	14.25	0.54	23	8
Lampung	14.35	1.54	24	19
Sulawesi Tengah	14.66	3.78	25	28
DI Yogyakarta	14.91	0.04	26	1
Aceh	17.08	0.77	27	10
Nusa Tenggara Barat	17.10	2.06	28	23
Bengkulu	17.88	1.45	29	18
Gorontalo	18.32	1.88	30	22
Maluku	19.51	5.44	31	32
Nusa Tenggara Timur	22.61	7.26	32	33
Papua Barat	25.82	4.19	33	30
Papua	28.17	9.41	34	34
Nasional	11.22	1.33		

Source: Author's calculation based on Susenas 2015



Persentase kontribusi deprivasi per indikator terhadap IKM propinsi

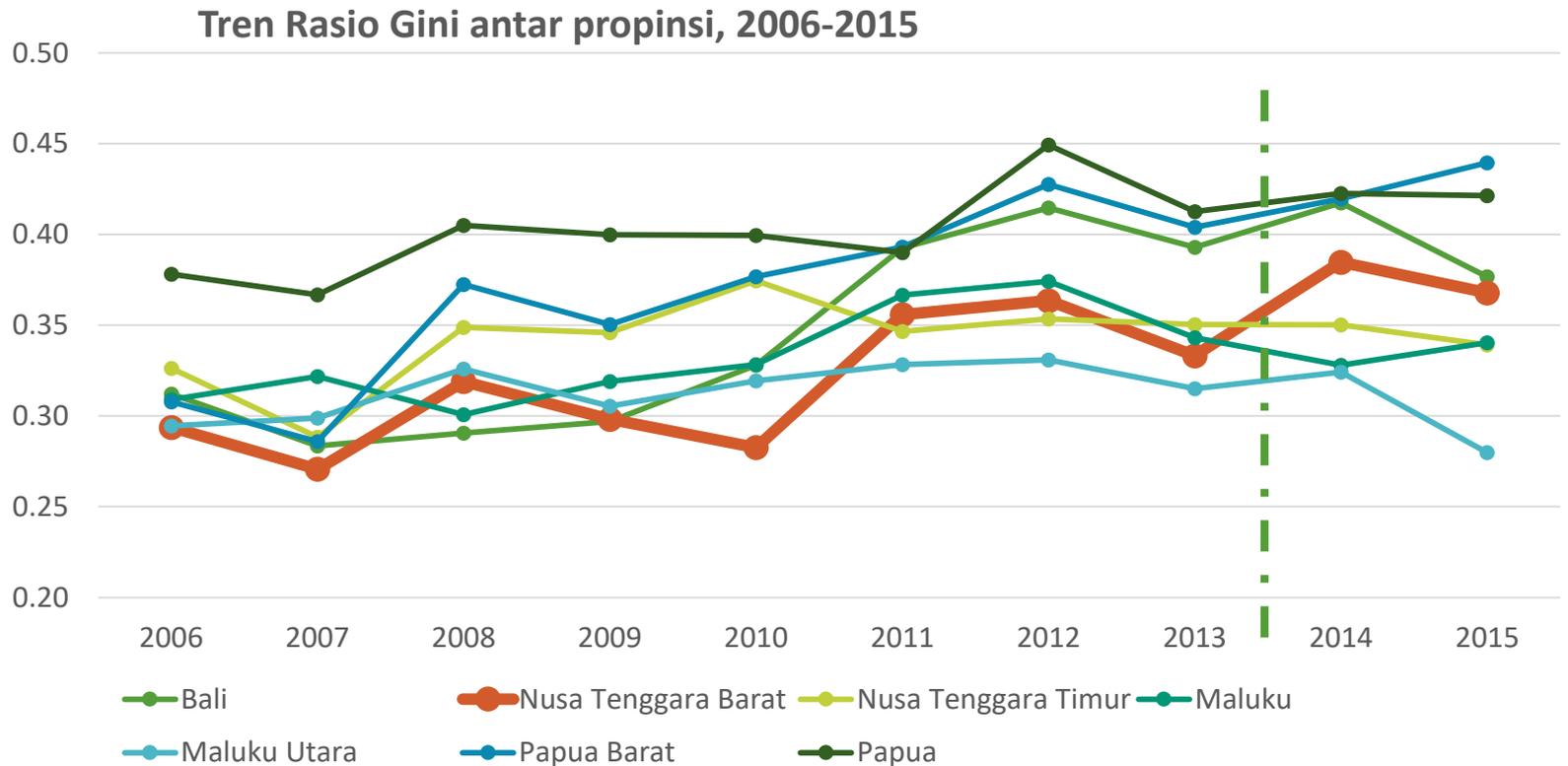


Sumber: Susenas 2015



Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan

- Ketimpangan ekonomi berdasarkan pengeluaran Per-kapita

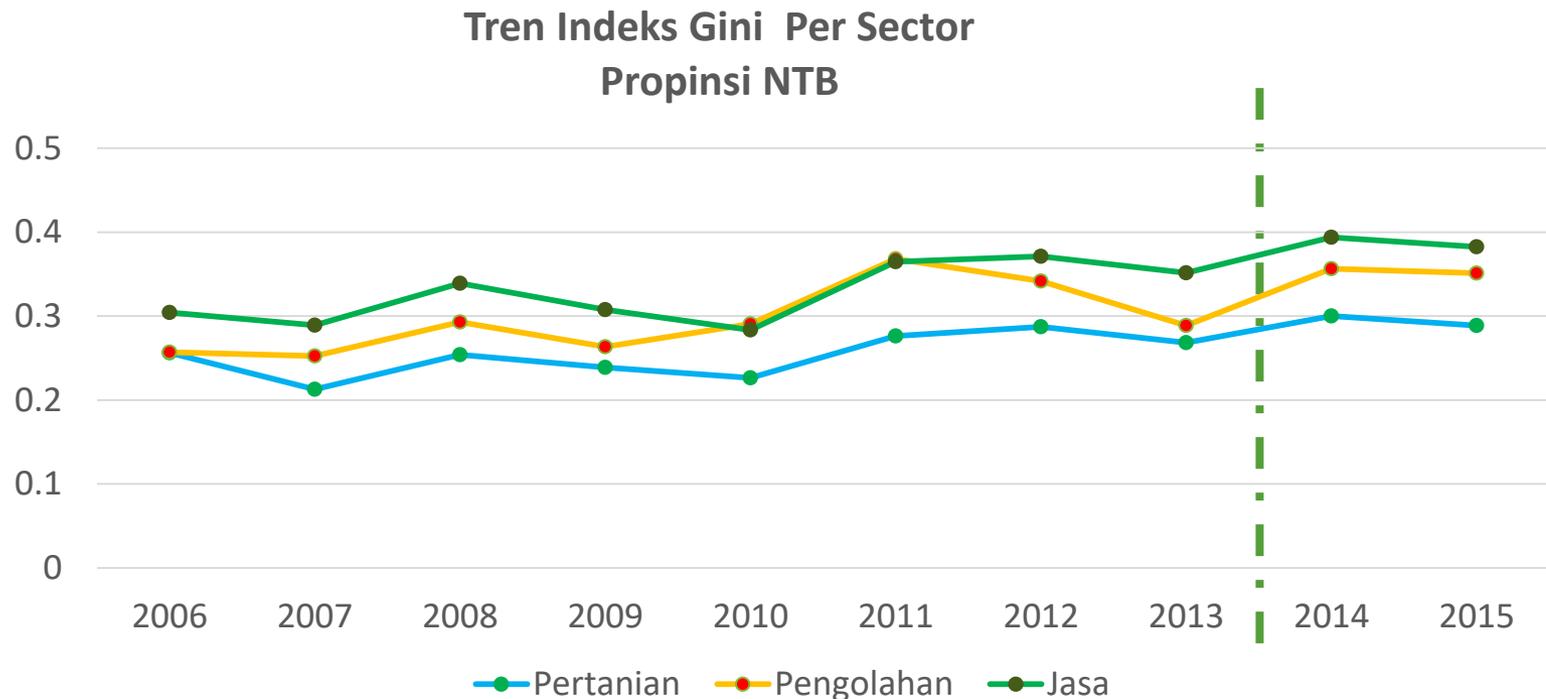


Terjadi sedikit penurunan ketimpangan ekonomi di NTB dari 0.38 ke 0.37, walaupun tingkat ketimpangannya masih lebih tinggi dibanding NTT dan Maluku



Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan

- Ketimpangan ekonomi berdasarkan pengeluaran per-kapita

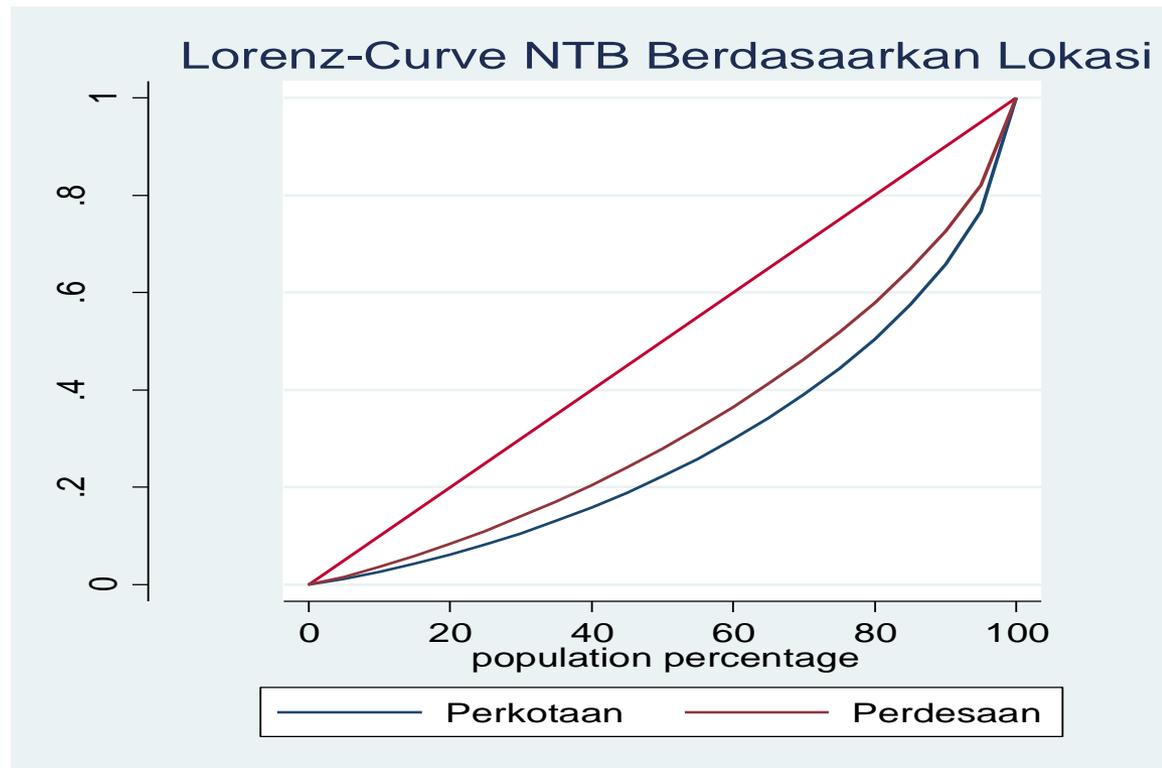


- *Terjadi peningkatan tren ketimpangan pengeluaran per-kapita di ketiga sektor*
- *Tingkat ketimpangan di sektor jasa adalah yang tertinggi, disusul oleh pengolahan, dan pertanian*



Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan

Dekomposisi ketimpangan di Propinsi NTB berdasarkan lokasi perkotaan dan perdesaan

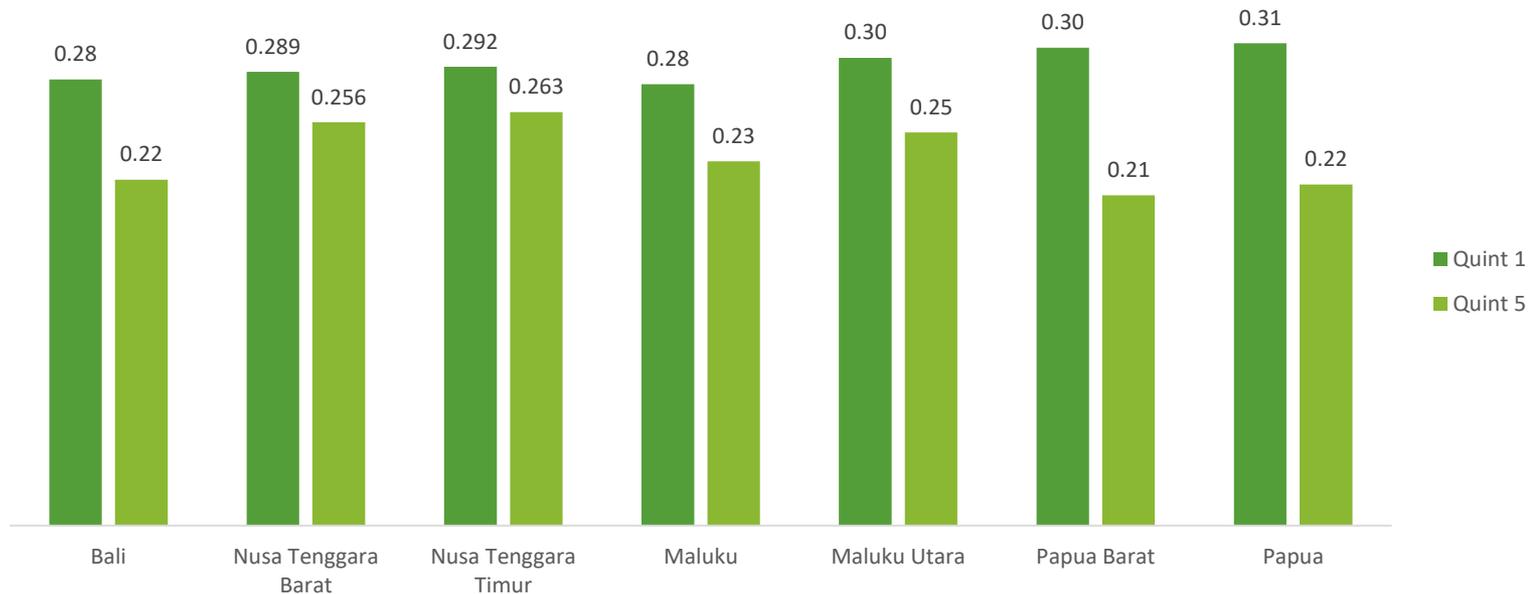


Ketimpangan di perkotaan lebih lebar dibandingkan ketimpangan di perdesaan



Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan

Perbandingan Rasio Gini Lama Sekolah antara Kuintil 1 dan Kuintil 5 di Indonesia Timur



■ Ketimpangan pendidikan

Tidak terjadi Ketimpangan lebar dalam hal lama tahun bersekolah antara penduduk NTB di kuintil pengeluaran 1 dan 5; hampir sama dengan penduduk di NTT dan jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia Timur



Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Dekomposisi Ketimpangan di Propinsi NTB berdasarkan Gender Kepala Rumah Tangga

Kelompok	Jumlah Penduduk	Rata-rata Pengeluaran Perkapita	Theil T	Theil L
Kepala Rumah Tangga LK	4.101.802 (85.3%)	679.711	0.27946	0.22257
Kepala Rumah Tangga PR	708.909 (14.8%)	603.083	0.24463	0.20778
Semua Rumah Tangga	4.810.711 (100%)	668.419	0.27567	0.22126
Kontribusi dari Komponen dalam kelompok (%)			0.27483 (99.7)	0.22039 (99.6)
Kontribusi dari Komponen antar kelompok (%)			0.00085 (0.3)	0.00087 (0.4)

Ketimpangan di antara anggota rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, namun proporsi penduduk dengan kepala rumah tangga LK hampir 4x dari penduduk yang dikepalai PR, sehingga perbedaan ketimpangan antara RT dikepalai LK dan PR tidak signifikan kontribusinya terhadap total ketimpangan

Kesimpulan

- Kemiskinan:
 - Penanggulangan kemiskinan, baik moneter maupun multidimensi, perlu tetap menjadi prioritas utama pembangunan di Propinsi NTB.
 - Propinsi NTB berhasil dalam menurunkan persalinan dengan non nakes, anak 0-17 tahun tanpa akte kelahiran, dan anak usia 6-15 tahun yang putus sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing indikator yang kecil terhadap IKM.
 - Permasalahan utama untuk menurunkan kemiskinan multidimensi di Propinsi NTB adalah meningkatkan layanan jaminan kesehatan, cakupan imunisasi lengkap, partisipasi balita dalam PAUD, dan akses terhadap air bersih.

Kesimpulan

- Ketimpangan:
 - Secara keseluruhan, terjadi sedikit penurunan ketimpangan ekonomi di Propinsi NTB dari tahun 2014 ke tahun 2015, namun masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi NTT, Maluku, dan Maluku Utara.
 - Ketimpangan di dalam masing-masing wilayah perkotaan dan perdesaan berpengaruh sangat besar terhadap ketimpangan total di tingkat propinsi.
 - Ketimpangan pendidikan yang diukur dari lama tahun bersekolah antara penduduk yang terkaya dan termiskin relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia bagian timur.
 - Ketimpangan ekonomi antara rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan yang dikepalai perempuan tidak berkontribusi nyata terhadap ketimpangan total.



Implikasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan multidimensi, Propinsi NTB perlu memprioritaskan pada upaya peningkatan:

- akses dan perbaikan layanan kesehatan, yang dapat dilakukan dengan menyediakan pelengkap bagi program Jaminan Kesehatan Nasional seperti memperbaiki fasilitas kesehatan dasar dan menyediakan bantuan biaya non-medis;
- akses bagi anak balita terhadap PAUD, yang dapat dilakukan melalui pengembangan PAUD berbasis komunitas;
- akses terhadap air bersih, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara komunitas dengan pihak swasta, khususnya dengan mengarahkan pemanfaatan CSR.

Terima Kasih

